

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA ASING
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**AHMAD DIANTORO
NPM : 1421020143**

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA ASING
MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh

**AHMAD DIANTORO
NPM : 1421020143**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Susiadi, AS., M.Sos.I

Pembimbing II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan pembangunan guna mewujudkan tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Di era globalisasi yang terjadi di Indonesia ini, tidak dapat dihindari adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja secara optimal. Selanjutnya untuk memberikan izin dalam mempekerjakan TKA, diperlukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kedua tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui tentang penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing dan untuk mengetahui tentang penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Presiden No 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing di tinjau dari hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), dan sifat penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif* dan *deskriptif-analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari referensi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama, Prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 diatur dalam pasal 10 yang berbunyi setiap pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: alasan penggunaan TKA, jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab di dalam *siyasah dauliyah*, istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 juga demikian, TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapat izin terlebih dahulu, apabila izinnya habis bias diperpanjang atau kembali ke negara asalnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TENAGA KERJA ASING MENURUT
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN
2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA
KERJA ASING**

Nama : AHMAD DIANTORO

NPM : 1421020143

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Drs. Susiadi, AS., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.
NIP. 195703051978031001

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

PENGESAHAN

Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TENAGA KERJA ASING MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**, disusun oleh **AHMAD DIANTORO**, NPM: 1421020143, Jurusan: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada hari/tanggal: **Senin, 30 Desember 2019.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

Penguji Utama : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Penguji I : Drs. Susiadi, AS., M.Sos.I.

Penguji II : Drs. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairuddin, M.H.

HP: 08210221993031002

MOTTO

إِلَيْكَ مَأْمَنُهُ دَأْبِلْغُهُ ثُمَّ إِلَهٌ كُلَّمَا يَسْمَعُ حَتَّىٰ فَأَجْرُهُ اسْتَجَارَكَ الْمَشْرِكِينَ مِنْ أَحَدُوهُمْ

يَعْلَمُونَ لَا قَوْمٌ بِأَعْلَمُ

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar Firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.”
(Q.S. at-Taubah (9) : 6).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Idham Kholid dan Ibundaku Rusmiati, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta Adikku Farid Yoga Nata, yang selalumemberikan support, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Ahmad Diantoro, dilahirkan di Sumber Agung pada tanggal 27 Maret 1995, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Idham Kholid dan Rusmiati.

Pendidikan penulis di mulai dari tingkat SDN 2 Bumi Agung lulus pada tahun 2008, melanjutkan ke SMPN 1 Belitang, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”

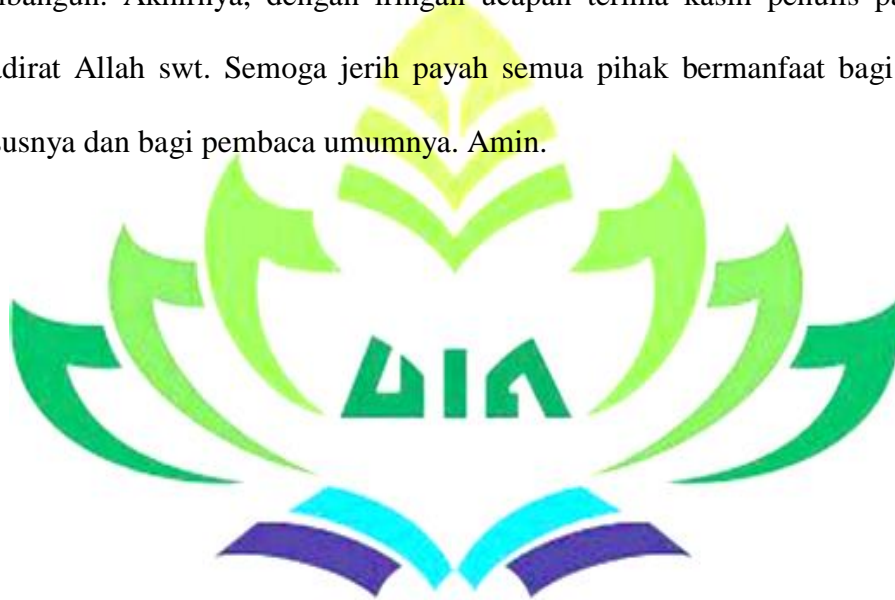
Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah).
4. Drs. Susiadi, AS., M.Sos.I. selaku pembimbing I, dan Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Angkatan 2014
8. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terima kasih penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.



Bandar Lampung, Desember 2019

Ahmad Diantoro
NPM. 1421020143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	1
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian	12
E. Rumusan Masalah	12
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
G. Signifikansi Penelitian	13
H. Metode Penelitian	13

BAB II SIYASAH DAULIYAH ATAU HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Konsep Hubungan Internasional dalam Islam	16
B. Pembagian Kewarganegaraan dalam Fiqh Siyasah	26
C. Pemberlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Fiqh Siyasah	33
D. Ketenagakerjaan dalam Pandangan Islam	39
E. Tinjauan Pustaka	46

BAB III PENYAJIAN DATA

A. TKA Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	53
B. TKA Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA	64
C. TKA Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	

BAB IV ANALISIS DATA

A. Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	77
---	----

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018	85
Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”. Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, yaitu:

1. Tinjauan Hukum Islam

a. Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata tinjau, yaitu berarti pandangan atau pendapat sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹

b. Hukum Islam menurut T.M Hasbi Ashshiddiqi adalah koleksi para ahli hukum (*fuqoha*) untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.²

Jadi yang dimaksud dengan tinjauan hukum Islam adalah pandangan hukum Islam sesudah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.

2. Tenaga Kerja Asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018

a. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.³

b. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yaitu tentang Tenaga Kerja Asing

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 951

² Hasby Ash-Shiddiqy, *Falasafah Hukum Islam*(Bulan Bintang, Jakarta, 1975), h. 44.

³ Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.Tentang penggunaan tenaga kerja asing Pasal 1

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing yaitu warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pandangan hukum Islam terhadap penggunaan warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

B. Alasan memilih Judul

Alasan memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Objektif

Penulis ingin menganalisis tentang penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan tenaga kerja asing. Hal ini disebabkan karena banyaknya kasus di televisi atau media sosial digital maupun cetak terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang dianggap sangat merugikan masyarakat setempat.

2. Subjektif

- a. Menurut hemat penulis permasalahan ini belum ada yang membahasnya, khususnya di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selain itu sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

- b. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga peneliti berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang di rencanakan.

C. Latar Belakang

Hubungan Negara dan warga Negara ibarat ikan dan airnya. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin, melindungi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali.⁴ Secara jelas dalam amandemen UUD 1945 Pasal 34, disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (ayat 1); Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (ayat 2); Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum yang layak (ayat 3).⁵

Dalam Pasal 27 ayat 2 berbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁶

Dalam Pasal 28D ayat 2 berbunyi:

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁷

⁴ A. Ubaidillah& Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 130.

⁵ UUD NRI 1945 Pasal 34 Ayat 1-3

⁶ UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat 2

⁷ UUD NRI 1945 Pasal 28E Ayat 2

Di negara ini, tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja, dari yang ingin menjadi karyawan kantor/pabrik, guru, dokter, sampai jadi presiden pun semua diperbolehkan. Dengan lapangan kerja yang terbatas, maka tentu saja lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Maka, bukan tidak mungkin akan terjadi pengangguran di mana-mana. Padahal orang harus bekerja untuk bisa hidup sejahtera lahir dan batin.⁸

Di era globaisasi, Indonesia yang merupakan negara besar dengan potensi Sumber Daya Alam yang memadai, ditambah SDM yang banyak, Indonesia berpotensi menjadi negara tujuan investasi. Tapi jika tidak, diikuti dengan kemampuan dan mentalitas tenaga kerja lokal yang memadai, potensi itu hilang. Bukan hanya produk yang diimpor, tenaga kerja pun harus mendatangkan dari negara lain. Ini bisa menjadi bencana jika tidak diantisipasi sejak dini.⁹

Apa yang sekarang disebut “Globalisasi” pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20 M, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas dan mempercepat perdagangan antar bangsa. Disamping pertambahan dan percepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, juga industri dan perusahaan media masa.¹⁰

⁸ Suroto, *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), h. 21.

⁹ *Ibid*, h. 22

¹⁰ Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman* (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 212.

Kapitalis ialah hubungan-hubungan diantara para pemilik pribadi atas alat-alat produksi yang bersifat non-pribadi (tanah, tambang, instalasi industry dan sebagainya, yang secara keseluruhan disebut modal atau capital) dengan para pekerja yang biarpun bebas namun tak punya modal, yang menjual jasa tenaga kerjanya kepada para majikan.¹¹

Indonesia sebagai negara hukum memerlukan pembangunan guna mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam hal pembangunan ketenagakerjaan. Menghadapi perkembangan dunia dengan kecanggihan teknologi dan informasi berpengaruh pula di sektor ekonomi di mana globalisasi ekonomi telah diprogramkan dalam agenda pembangunan nasional dengan menciptakan lapangan kerja untuk kesejahteraan rakyat dalam rencana perbaikan iklim ketenagakerjaan.

Menyadari sedalam-dalamnya bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia yang bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya diperlukan penataan kembali berbagai segi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi umumnya, khususnya di dalam hubungan perburuhan.¹²

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tenaga kerja juga meningkat. Tingginya pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama kelebihan tenaga kerja secara umum di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Penciptaan lapangan kerja adalah sasaran pokok pemerintah dalam agenda

¹¹ Dudley Dillard, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, terj. M. Dawam Rahardjo (Jakarta: LP3ES, 2004), h. 15.

¹² Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 183

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.¹³

Dalam era globalisasi yang terjadi di Indonesia ini, tidak dapat dihindari adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disebut TKA), pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 hal, yakni TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan/atau membawa skill dalam rangka *transfer of knowledge* atau *transfer of know how*. Selain karena kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak diperkenankan menggunakan TKA dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja dari Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia).¹⁴

Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, tetapi juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja. Derasnya arus migrasi tenaga kerja pada dasarnya merupakan resultan dari tiga kondisi yang berbeda di masing-masing negara maju, negara industri baru dan negara miskin dan berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara maju telah mendorong tingkat upah dan kondisi lingkungan kerja ke taraf yang lebih baik lagi. Di negara industri baru, percepatan pembangunan ekonomi menyebabkan permintaan akan tenaga kerja yang berketrampilan harus didatangkan dari negara maju, sedangkan untuk pekerjaan yang lebih mementingkan otot datang dari negara miskin dan berkembang. Kehadiran para

¹³ G.Karta Sapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 2004), h. 46

¹⁴ C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia* (Jakarta: HIPSMI, 2006), h. 57

tenaga kerja yang memakai otot tidak hanya karena adanya pengiriman dari negara asal melainkan juga karena ada permintaan dari negara yang dituju karena permintaan akan selalu hadir jika ada penawaran, begitu juga sebaliknya.¹⁵

Negara-negara yang miskin dan berkembang, kesulitan mendapatkan pekerjaan dan upah yang rendahlah yang mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja. Tujuan penggunaan TKA tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan professional dibidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia serta mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan investasi asing sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataanya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan- perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.¹⁶

Untuk menghindari penggunaan Tenaga kerja asing yang berlebihan, maka pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya juga penyediaan kesempatan kerja itu bagi Warga Negara Indonesia sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satu negarapun di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan negara lain. Karena antara negara-negara tersebut terdapat adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan kepentingan masing-masing.

¹⁵ *Ibid.* h. 60

¹⁶ *Ibid.* h. 61.

Berdasarkan hal tersebut timbullah suatu hubungan yang tetap dan terus menerus antara negara-negara yang bersangkutan.¹⁷

Ada beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan TKA yakni adanya peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, kondisi pasar dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan internasional dalam liberalisasi kerja pasar bebas. Kebijakan pengguna TKA tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap kesempatan kerja lokal sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 D Amandemen UUD 1945.

Dalam Pasal 27 ayat (2) berbunyi:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.

Dalam Pasal 28D berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah.

Sementara pekerja/buruh dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁸

¹⁷ Narsif, *Hukum Diplomatik Konsuler* (Padang, Universitas Andalas, 2007), h 1.

¹⁸ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 3

Para pekerja yang bekerja di negara Indonesia selain warga asli juga terdapat orang asing dari negara lain yang biasanya disebut TKA. Sementara yang dimaksud orang asing adalah tiap-tiap orang yang bukan warga Negara Republik Indonesia.¹⁹

Pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja secara optimal. Selanjutnya untuk memberikan izin dalam mempekerjakan TKA, diperlukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pengertian tentang izin kerja pada prinsipnya adalah izin yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan tertentu untuk mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia dengan menerima upah dan waktu tertentu.

Islam memandang “kerja” sebagai hal yang luhur dan bahkan menempatkannya sebagai salah satu wujud ibadah, selama niatnya benar dan prakteknya tidak menyalahai aturan Allah. Islam memberi motivasi dan rangsangan yang kuat kepada orang yang suka kerja dengan baik. Bukan hanya keuntungan dunia tetapi juga pahala ukhrawi. Islam sejak awal pertumbuhannya, sudah membina lingkungan sosio cultural yang “cipta kerja” sebagai bagian dari perintah agama.²⁰

Pandangan dan sikap Islam terhadap kerja apabila kita mengikuti nash-nash Qur’aniyah maupun sunnah Nabawiyah, maka pemakaian kata “*al-Amal*”,

¹⁹ H.S.Syarif, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2003), h. 6.

²⁰ Muhammad Thalhah Hasan, *Islam & Masalah Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lantabora Pers, 2005), h. 244.

tidak hanya memberikan konotasi pada amal ibadah makhdloh, tetapi juga amal-amal yang berbobot *iqtishodiyah* (ekonomis) dan *ijtima'iyah* (social), seperti dalam surat Yasin ayat 34 yaitu mensyukuri nikmat menuntut adanya upaya menjaga kelestarian nikmat itu,²¹

﴿الْعُيُونِ مِنْ فِيهَا وَفَجَّرْنَا وَأَعْنَبٍ خَيْلٍ مِّنْ جَنَّتِ فِيهَا وَجَعَلْنَا

Artinya: *Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air.* (Q.S. Yasin (36): 34).²²

Dalam surat an-Nahl ayat 93 yaitu memberikan isyarat tentang tanggung jawab terhadap pekerjaan,

﴿لَوْ كُنْتُمْ عَمَّاوَلْتَسْأَلُنَّ بِشَاءٍ مِّنْ وَيَهْدِي شَاءٍ مِّنْ يُضِلُّ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَّجَعَلَكُمْ
تَعْمَ﴾

Artinya: *Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.* (Q.S. An-Nahl (16): 93).²³

Sementara dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan bahwasanya di ayat tersebut diatur dengan baik, antara kerja yang bersifat ritual seperti shalat dan kerja yang bersifat ritual seperti shalat dan kerja yang bersifat komersial.

²¹ *Ibid*, h. 239.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 710.

²³ *Ibid*. h. 416.

يُسَبِّحُ اللَّهَ الْحَكِيمَ الْعَزِيزَ الْقُدُّوسَ الْمَلِكَ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا

Artinya: *Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. al-Jumu'ah (62): 10).²⁴

Dalam pandangan Islam, umumnya para ulama sepakat, bahwa industri (*shina'at*) dan pekerjaan-pekerjaan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, hukumnya fardhu kifayah. Imam Al-Ghazali dalam bukunya "*Ihya Ulumiddin*" dalam jilid II menyatakan: "Bahwa yang termasuk fardlu kifayah adalah semua pengetahuan dan profesi yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan hidup di dunia, seperti kedokteran, hisab, dasar industri dan politik".²⁵

Dan Ibnu Taimiyah dalam bukunya "*Al-Hisbah*" mengatakan: "lebih dari seorang pengikut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Abi Al-Faraj, Ibnu Al-Jauzi dan lainnya mengatakan, bahwa pertanian, pertekstilan, konstruksi bangunan (*al-filahah wa al-nisajah wa al-binayah*) adalah termasuk fardlu kifayah, karena kemaslahatan hidup manusia tidak mungkin sempurna tanpa adanya keahlian dan profesi tersebut".²⁶

Dengan demikian, bahwa Islam memandang "kerja" sebagai hal yang luhur dan bahkan menempatkannya sebagai salah satu wujud ibadah, selama niatnya benar dan prakteknya tidak menyalahi aturan Allah, Islam memberi motivasi dan rangsangan yang kuat kepada orang yang suka kerja dengan baik,

²⁴ *Ibid.* h.933.

²⁵ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, h. 240.

²⁶ *Ibid.* h. 240.

bukan hanya dengan keuntungan dunia tetapi juga pahala ukhrowi, dan Islam sejak awal pertumbuhannya, sudah membina lingkungan sosio kultural yang “cipta kerja” sebagai bagian dari perintah agama.²⁷

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan di teliti adalah tinjauan hukum Islam terhadap tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, sehingga tidak akan terjadi pembahasan yang terlalu lebar dan meluas.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tentang prosedur penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing.
 - b. Untuk mengetahui tentang prosedur penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing di tinjau dari hukum Islam.

²⁷ *Ibid*, h. 244.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang tenaga kerja asing.
2. Secara praktis penelitian ini dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penggunaan tenaga kerja asing serta untuk memenuhi syarat akademik.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *Library Research* yaitu “Penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan bahan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis”²⁸

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *Yuridis Normatif*. Adapun bentuk penelitian *Yuridis Normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁹ Dan *Deskriptif-Analitis*, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang

²⁸ Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju. 1990), h. 78.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Peneliti Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h. 15.

diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³¹ Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Al-quran dan Hadits
- 2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- 3) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018

b. Data sekunder

Sumber tidak diperoleh secara langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder diperoleh dari referensi, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan yaitu: “Penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literature atau

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: citra Aditya Bakti, 2004, h. 126.

³¹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2013), h 75.

bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituang dalam kerangka pemikiran secara teoritis”³².

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-qur'an dan hadits, atau buku-buku literature lainnya yang relavan dengan penelitian.
- c. Sistematika data yaitu merupakan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³³

5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.³⁴

³² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), h. 114.

³³ Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107

³⁴ Sugiyono, *Memahami Pengertian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), h. 92

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Hubungan Internasional dalam Islam

1. Sejarah Hubungan Internasional dalam Islam

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu. Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olah raga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara yang ada selalu dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk berperang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh.³⁵

Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada peradaban yang datang kemudian. Dengan demikian, maka kebudayaan Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang kemudian. Selain sentuhan-sentuhan budaya pada waktu damai, terutama

³⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 181-182.

dengan melalui perguruan-perguruan Islam masa itu, seperti sentuhan budaya antara Islam dan Barat pada waktu perang, yaitu pada perang salib. Islam pada waktu perang memperkenalkan perilaku-perilaku dan keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap musuh, terhadap tawanan perang dan prinsip-prinsip serta tata cara dan etika perang dalam Islam.³⁶

2. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah dauliyah*

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan Konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuasaan-kekuasaan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep *siyasah dauliyah*. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep *siyasah dauliyah*.³⁷

Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *siyasah* adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata *dauliyah* memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian Ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antar negara. Oleh karena

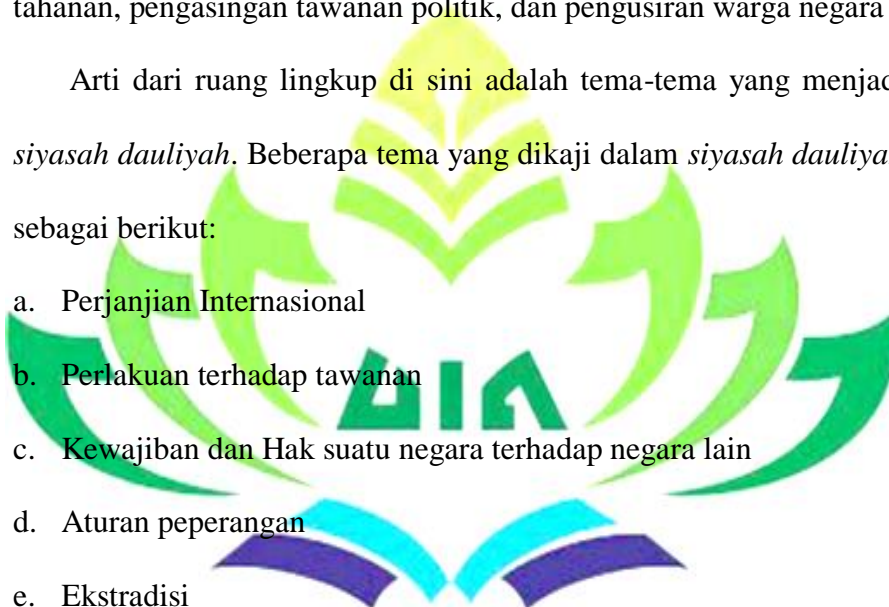
³⁶ *Ibid*, h. 184-185.

³⁷ Ija Suntana, *Pengantar Mata Kuliah Siyasah dauliyah* (Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2003), h. 3.

itu, *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain (antar negara).³⁸

Sementara menurut Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, menjelaskan bahwa dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *siyasah dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing.³⁹

Arti dari ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian *siyasah dauliyah*. Beberapa tema yang dikaji dalam *siyasah dauliyah* adalah sebagai berikut:

- 
- a. Perjanjian Internasional
 - b. Perlakuan terhadap tawanan
 - c. Kewajiban dan Hak suatu negara terhadap negara lain
 - d. Aturan peperangan
 - e. Ekstradisi
 - f. Pemberian suaka politik dan keamanan
 - g. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h. 4.

³⁹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 41.

⁴⁰ Ija Suntana, *Pengantar Mata Kuliah Siyasah dauliyah*, h. 15.

3. Azas-azas Hubungan Internasional Islam

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyasah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyasah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Islam atau tidak, yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan kehidupan yang berbahagia, damai, dan sama-sama dari Nabi Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan menutupi kekurangan masing-masing.⁴²

Al-Qur'an mengisyaratkan tentang kesatuan manusia ini, di antaranya Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 213, sebagai berikut:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ

⁴¹ *Ibid.* h. 15

⁴² H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* ..., h. 187.

الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهِ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنۢ يَّشَآءُ ۚ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢١٣﴾

Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Q.S. al-Baqarah (2): 213).⁴³

b. Al-Adalah (Keadilan)

Di dalam *siyasah dauliyah* hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik antara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu ajaran Islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, baik terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil.⁴⁴ Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 8, yaitu sebagai berikut:

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 128.

⁴⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 189.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Maidah (5): 8).*⁴⁵

Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam sistem pemerintahan Islam dan perwujudannya merupakan syarat tegaknya pemerintahan ini, atau dalam istilah fiqih Islam yaitu syarat awal. Adil juga merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara Islam atau dalam istilah fikih Islam yaitu syarat abadi.⁴⁶

c. *Al-Muyawah* (Persamaan)

Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antarbangsa tidak diperkenankan sedikitpun mempertimbangkan asal usul, ras, agama, bahasa dan status sosial dalam menentukan hak membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 398.

⁴⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 210.

kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban.⁴⁷ Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 13, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarat (49): 13).*⁴⁸

d. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Asas kehormatan manusia menghendaki agar satu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Azas kehormatan menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional.⁴⁹ Adapun ayat Al-qur'an yang menerangkannya yaitu sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: *Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka*

⁴⁷ Ija Suntana, *Pengantar Mata Kuliah Siyasah dauliyah*, h. 16.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 568.

⁴⁹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah dauliyah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 17.

*dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.(Q.S. al-Isyrah(17): 70)).*⁵⁰

e. Tasamuh (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan yang lebih baik akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralsir.⁵¹ Adapun ayat Al-qur'an yang menerangkannya yaitu sebagai berikut :

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

Artinya: *Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia. (Q.S. Fushilat (41): 34).*⁵²

f. Kerjasama Kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama disini adalah kerjasama disetiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan karena adanya saling ketergantungan baik antara individu maupun antar Negara dunia ini. Kerja sama merupakan hal yang menguntungkan dalam suasana baik dan untuk kebaikan bersama. Bukan untuk bermusuhan. Allah akan memberikan kekuatan pada orang yang mau menolong pada

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 414.

⁵¹ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 194

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 774

sesama manusia dimana saja. Nabi Muhammad saw mengajarkan dalam hubungan sesama manusia harus terjadi adanya ukhuwah insaniyah, kesadaran akan perlunya kerjasama dan tolong menolong dalam segala bentuk dan cara yang di sepakati yang baik, akan menghilangkan nafsu permusuhan, dan saling berebut hidup. Kehidupan individu dan antar bangsa akan harmonis apabila di dasarkan pada kerjasama bukan pada saling menghancurkan yang satu dengan yang lain.⁵³

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang Islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut.⁵⁴

- 1) Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- 2) Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- 3) Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
- 4) Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- 5) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i.*)

⁵³ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 196.

⁵⁴ Mohammad Rusfi, AL-'ADALAH, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67, (On-Line), tersedia di: <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah> (9 Mei 2019)

g. Kebebasan, kemerdekaan/ *Al-huriyah*

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian kebebasan bukanlah mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan ini bisa di rincikan lebih jauh seperti ini :

- 1) Kebebasan berpikir.
- 2) Kebebasan beragama.
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat.
- 4) Kebebasan menuntut ilmu.
- 5) Kebebasan memiliki harta.⁵⁵

h. Perilaku moral yang baik

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antar umat dan antara bangsa di dunia, selain itu prinsip ini pun di terapkan seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati dan alam hewani, budi baik ini tercermin antara lain di dalam kasih sayang.⁵⁶

Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber hubungan internasional itu adalah perjanjian antarbangsa. Apabila perjanjian yang telah di sahkan dan di buat kemudian tidak di tepati, maka kepercayaan akan hilang. Dan apabila sudah terjadi krisis kepercayaan, maka

⁵⁵ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah dauliyah*, h. 197-198.

⁵⁶ *Ibid*, h. 199.

malapetakah yang akan muncul. Inilah dasar-dasar *siyasah* di dalam hubungan internasional atau *siyasah dauliyah*, dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa ukhwah insaniyah di samping umat dalam arti komunitas adalah keluarga sakinah.⁵⁷

B. Pembagian Kewarganegaraan dalam *Fiqh siyasah*

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan secara adil tanpa membedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya. Berdasarkan prinsip ini, maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antarmanusia, baik sesama Muslim sendiri maupun non-Muslim. Dengan berlandaskan pada agama yang diyakini seseorang, mempertimbangkan negara yang menjadi tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan perjanjian dengan pemerintah Islam, para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seorang Muslim dan non-Muslim. Orang non-Muslim terdiri dari *al-dzimmi*, *musta'min*, dan *harbiyun*. Penduduk *dar al-Islam* terdiri dari Muslim, *ahl al-dzimmi* dan

⁵⁷ *Ibid*, h. 200.

musta'min, sedangkan penduduk *dar al-harb* terdiri dari Muslim dan *harbiyun*.⁵⁸

1. Muslim

Istilah *Muslim* merupakan nama yang diberikan bagi orang yang menganut agama Islam. Seorang Muslim meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam akidah, syari'ah dan akhlak sebagai aturannya. Di samping itu, ia menentang segala bentuk penyimpangan yang dapat mengubah identitas seseorang dari Muslim. Kata Muslim berasal dari bahasa Arab, yang berarti “orang yang selamat”. Ini seakar dengan kata “Islam” yang berarti menyelamatkan.⁵⁹ Gelar muslim sendiri langsung diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 78, yaitu sebagai berikut:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

Artinya: *Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah*

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). h. 269.

⁵⁹ Ija Suntana, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah dauliyah*, h. 13

*zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Q. S. Al-Hajj (22): 78).*⁶⁰

Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. *Pertama*, mereka yang menetap di *dar al-Islam* dan mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan *dar al-Islam*. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap sementara waktu di *dar al-Islam* sebagai *musta'min* dan tetap komitmen kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam. *Kedua*, muslim yang menetap di *dar al-harb* dan tidak berkeinginan hijrah ke *dar al-Islam*. Status mereka, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, sama dengan Muslim lainnya di *dar al-Islam*. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara. Namun menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk *harbiyun*, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam. Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.⁶¹

2. *Ahl al-Dzimmi*

Secara etimologis, *dzimmi* berarti warga negara non-Muslim yang menjadi warga negara di negara Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan Islam. Secara istilah, *dzimmi* adalah sekelompok orang non-Muslim yang hidup (bertempat tinggal) di wilayah yang berada di bawah kekuasaan muslim. Makna *dzimmi* berbeda dengan *harbi*. Jika istilah *harbi* yakni orang non-muslim yang menentang dan memusuhi Islam. Menurut Sayyid Sabiq, *dzimmi* juga berbeda dengan kaum *muahad*. *Muahad* adalah warga non-

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 523.

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 271.

muslim yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik perjanjian itu berisi memohon jaminan keamanan dari orang Islam atau perjanjian gencatan senjata yang ditetapkan oleh penguasa Islam, maupun berdasarkan kontrak *fidyah*. Jika ditinjau dari kondisi ini maka perbedaan agama di Indonesia dapat dikategorikan menjadi kaum *dzimmi* (warga non-muslim) yang harus dilindungi dan saling menghargai menuju kehidupan yang aman dan damai.⁶²

Sementara menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya berjudul *Fiqh siyasah*, kata *ahl al-dzimmi* atau *ahl al-dzimmah* merupakan bentuk *tarkib idhafi* (kata majemuk) yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata “*ahl*” secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Adapun kata “*dzimmi/dzimmah*” berarti janji, jaminan, atau keamanan. Dalam pandangan al-Ghazali, *ahl al-dzimmi* adalah setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, laki-laki, mampu berperang, dan membayar *jiizyah*. Ibnu al-Juza’il al-Maliki memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali bahwa *al-dzimmi* adalah orang kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, menganut agama yang bukan Islam, mampu membayar *jizyah* dan tidak gila. Al-Unqari mempertegas pendapat di atas dengan menyimpulkan bahwa *ahl al-dzimmi* adalah orang non-muslim yang menetap di *dar al-Islam* dengan membayar *jizyah*.⁶³

Menurut H. A Djazuli dalam buku *Fiqh Siyasahnya*, *jizyah* dikatakan sebagai iuran negara yang diwajibkan atas orang ahl al-kitab

⁶² M. Alifudin Ikhsan, *Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia*, JIPPK, Vol. II, No 1. Juni, h. 36.

⁶³ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 271-272.

setiap satu tahun sekali, sebagai imbalan membela dan melindungi mereka. *Jizyah* diistilahkan juga dengan pajak kepala bagi semua orang laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat. Sedangkan *jizyah* dalam ilmu fiqh berarti pajak kepala atau pajak perseorangan yang dikeluarkan terhadap orang-orang non-muslim (*ahl al-zimmah*) tertentu yang telah mengikat perjanjian dengan pemerintah. Dengan kata lain, *jizyah* merupakan pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang laki-laki non-muslim, merdeka, balig, berakal, sehat, dan kuat, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka.⁶⁴

Pemerintah Islam boleh melakukan perjanjian akad *dzimmah* dengan non-muslim yang ingin menetap di *dar al-Islam*. Namun dalam menentukan non-muslim mana yang termasuk *ahl al-dzimmah* ini, ulama berbeda pendapat. Menurut kesepakatan ulama, *ahl al-dzimmah* adalah mereka yang termasuk ke dalam kategori *ahl al-kitab*, yaitu Yahudi, Nashrani, dan Majusi. Penganut agama ini dapat diterima untuk mengadakan perjanjian dengan pemerintah Islam. Penganut Majusi dikelompokkan kepada *ahl al-kitab* lainnya, meskipun kemudian mereka tinggalkan. Jadi pada prinsipnya penganut Majusi bukan *ahl al-kitab*. Kewajiban *jizyah* yang dibebankan kepada mereka adalah berdasarkan praktik Nabi SAW.⁶⁵

Konsep *ahl al-dzimmah* merupakan cikal bakal munculnya konsep penomorduuan terhadap non-Muslim. *Ahl al-dzimmah* adalah komunitas non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung

⁶⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 50.

⁶⁵ *Ibid*, h. 272.

jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan serta mendapatkan hak hidup dan bertempat tinggal di tengah mayoritas muslim. Dalam kitab fiqh klasik, *ahl al-dzimmah* dituntut melaksanakan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara sebagaimana komunitas muslim lainnya. Atas pendapat inilah, kaum *dzimmi* disebut sebagai kaum nomor dua.⁶⁶

3. *Musta'min*

Secara bahasa kata "*musta'min*" merupakan bentuk *ismi fa'il* (pelaku) dari kata kerja *ista'mana*. Kata ini seakar dengan kata *amana* yang berarti aman. Dengan demikian, kata *ista'mana* mengandung pengertian "meminta jaminan keamanan", dan orang yang meminta jaminan tersebut disebut *musta'min*. Menurut pengertian ahl fiqh, adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik ia Muslim maupun *harbiyun*. Menurut al-Dasuki antara *musta'min* dan *mu'ahid* mempunyai pengertian yang sama. *Mu'ahid* adalah orang non-Muslim yang memasuki wilayah *dar al-harb*. *Musta'min* adalah orang yang memasuki wilayah *dar al-Islam* sebagai utusan perdamaian., anggota korps diplomatik, pedagang/investor, atau orang-orang yang berhijrah. Mereka yang menetap di *dar al-Islam* dapat berubah status menjadi *dzimmi* melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintah Islam.⁶⁷

⁶⁶ M. Alifudin Ikhsan, *Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia*, JIPPK, Vol. II, No 1. Juni, h. 37.

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Ibid., h. 276.

Sementara pendapat lain mengatakan, *musta'min* adalah warga negara non-muslim yang memasuki negara Islam dengan aman.⁶⁸ *Musta'min* Adalah orang luar yang masuk ke negara lain dengan izin masuk (*al-aman*), baik Muslim atau kafir harbi. Jika seorang Muslim masuk ke Darul Harb / Darul Kufur, dia tidak dapat mengambil harta kafir di Darul Harb tersebut, misalnya dengan mengambil (*as-sariqah*) atau merampas (*al-ghashab*). Penyebab, seorang Muslim yang ikut dengan perjanjian yang Dia lakukan (*al Muslim 'inda syurutihim*). Biarkan seorang Muslim boleh masuk ke Darul Harb, seorang kafir harbi juga boleh masuk ke dalam Daulah Islamiyah. Rasulullah saw. Telah memberikan Jaminan keamanan kepada kaum kafir pada saat Fath Makkah. Rasulullah saw. bersabda (yang berarti, "Siapa saja yang menutup pintu, maka berarti dia aman." (HR. Muslim).⁶⁹

Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ini tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.⁷⁰

⁶⁸ M. Alifudin Ikhsan, *Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia*, h. 36.

⁶⁹ Kafir Harbi, *Musta'min*, dan Ahlul Dzimmah, <https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

⁷⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 276.

4. *Harbiyun*

Kata *harbiyun* berasal dari *harb*, berarti “perang”. Kata ini digunakan untuk pengertian warga negara *dar al-harb* yang tidak menganut agama Islam dan antara negara Islam dan *dar al-harb* tersebut tidak terdapat hubungan diplomatik.⁷¹

Sementara *Kafir Harbi* adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di dalam perjanjian (*dzimmah*) kaum muslim, baik orang itu *kafir mu'ahid* atau *musta'min*, ataupun bukan *kafir mu'ahid* dan *kafir musta'min*. Ditinjau dari aspek hukum, *kafir harbi* dibagi menjadi dua, yaitu *kafir harbi hukman*, artinya secara *de jure* (secara hukum) *kafir harbi*, dan *kafir harbi fi'lan* atau *kafir harbi haqiqatan* (de facto) yakni orang-orang kafir yang tengah berperang/memerangi kaum Muslim.⁷²

C. Pemberlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam *Fiqh siyasah*

Sejarah hak warga negara di dalam Islam sudah berlangsung ketika manusia ini sudah diturunkan oleh Allah untuk menjadi khilafah di muka bumi ini. Perkembangan perpolitikan di dalam Islam terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia agar berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa ketatanegaraan Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan hak-hak warga negara di dalam Islam terjadi pada saat adanya *Piagam Madinah*.

⁷¹ *Ibid*, h. 278.

⁷² Ahmad Hidayat, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol VI, No 2, *Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomatik pada Masa damai)*, September 2016, h. 277.

Dokumen Piagam Madinah merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukannya, dokumen ini telah diakui otentik.⁷³

Bagi Miriam Budiharjo strategi yang dilakukan Nabi dalam ilmu politik telah menunjukkan bukti kekuasaan politik berfungsi mengawasi, menertibkan dan mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tanpa adanya dominasi kekuasaan terhadap suku, ras tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁴ Apa yang dikatakan Miriam Budiharjo, sejalan dengan pandangan Nurcholis Madjid bahwa manusia hidup dalam suasana kerjasama antagonistic, penuh konflik dan persaingan. Adanya aturan tentang hubungan antar sesama manusia sekalipun terkesan ada unsur pemaksaan, tujuannya adalah untuk kebaikan bersama umat manusia sekaligus menjadi pedoman hidup manusia modern.⁷⁵

Hubungan antar sesama masyarakat dalam sebuah kekuasaan politik berada dalam sebuah konsep warga negara (*citizenship*) saat itu didasarkan pada keyakinan, bukan berdasarkan wilayah teritorial. Sekalipun kriteria warga negaranya berdasarkan agama/keyakinan, tidak berarti Islam melarang warga non muslim berdomisili di wilayah kekuasaan Islam. Penerimaan warga non-muslim yang berdomisili di wilayah Islam sangat terkait dengan konsep negara yang bersifat teologis. Jadi identitas warga negara didasarkan pada agama,

⁷³ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk* (Jakarta: UIPress, 1995), h. 36.

⁷⁴ Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1989), 38.

⁷⁵ Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh siyasah Sunni dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 1995), 590.

bukan wilayah teritorial seperti yang dipahami dalam konsep negara bangsa (*nation-state*).⁷⁶

Sebagai perwujudan dari bentuk kesepakatan masyarakat yang telah membuat kontrak sosial untuk membangun sebuah sistem pemerintahan, segala konsekuensinya semua masyarakat selalu taat dan patuh menjalankan hak-hak mereka sebagai warganegara. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam terdapat beberapa istilah sebagai identitas warganegara Islam yaitu Muslim, *zhimmi*, *musta'min*.⁷⁷

Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama dia tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi *harbiyun*. Sementara itu, *ahl al-dzimmi* yang menetap lama di *dar al-harb* berubah status menjadi *harbiyun*.⁷⁸

Namun demikian, jika *musta'min* itu seorang *kafir harbi* yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk (*al-aman*) hanya diberikan misalnya untuk satu bulan, dua bulan, atau lebih di bawah satu tahun. Hal ini karena seorang *harby* dibiarkan tinggal di *dar al-Islam* tanpa ditarik *jizyah*. Padahal *jizyah* dipungut satu tahun sekali. Mungkin,

⁷⁶ Ahmad Yani Anshori, *Islam dan Negara Bangsa di Indonesia dalam Antologi Islam* (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 210), 249.

⁷⁷ *Ibid*, h. 249.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 276.

maksimal *harby*, boleh tinggal tanpa *jizyah* selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar *jizyah* atau keluar dari *dar al-Islam*. Jika dia membayar *jizyah*, berarti dia menjadi *ahl al-dzimmah* atau warga negara khilafah. Jika dia keluar akhir tahun, dia tidak wajib membayar *jizyah*.⁷⁹

Hukum orang *musta'min* pada dasarnya sama dengan hukum *ahl al-dzimmah*. Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam, negara wajib melindunginya. Jika melakukan kejahatan, dia akan dikenai hukuman yang disetujui *ahl al-dzimmah*, kecuali hukuman peminum *khamr*. Hal ini karena *dar al-Islam* adalah tempat yang menerapkannya hukum-hukum syari'at terkait tanpa melihat bulu, baik terhadap orang Islam, *ahl al-dzimmah*, maupun *musta'min*.⁸⁰ Ajaran Islam membolehkan *dar al-Islam* menerima permohonan non-Muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surat at-Taubah ayat 6, yaitu sebagai berikut:

وَأِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ
مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui. (Q.S. at-Taubah (9): 6).⁸¹

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik *harbiyun* untuk mendapatkan jaminan keamanan di *dar al-Islam* harus dikabulkan. Keamanan

⁷⁹ Kafir Harbi, Musta'min, dan Ahlul Dzimmah, <https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 567.

ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan keluarga mereka juga. Ia tidak hanya dibolehkan menetap di *dar al-Islam*, tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar *jizyah*. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang ditetapkan dalam perjanjian dengan *dar al-Islam*. Namun mazhab Syafi'i membatasi masa aman tidak melebihi empat bulan, selama *musta'min* tersebut bukan musafir dan utusan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urusan *musta'min* itu sendiri. Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.⁸²

Menurut mazhab Maliki, keamanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan sendirinya berakhir setelah melewati masa empat bulan. Adapun keamanan yang dibatasi waktu tertentu berakhir sesuai masanya selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan. Mazhab Hanafi dan Syi'ah Zaidiyah membatasi masa aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si *musta'min* wajib membayar *jizyah* kepada pemerintah Islam, sebagaimana halnya *ahl al-dzimmi*. Sementara mazhab Hanbali memberi batasan waktu yang lebih luas dan lama, yaitu empat tahun. Ahmad Ibn Hanbal merujuk pendapatnya berdasarkan pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik memperoleh jamin keamanan selama tiga hingga empat tahun.⁸³

⁸² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 277.

⁸³ *Ibid*, h. 277.

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu. Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi semacam olah raga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam keadaan demikian, perang menjadi dasar hubungan di antara mereka. Setiap negara yang ada selalu dituntut untuk senantiasa mempersiapkan diri untuk berperang, baik dengan cara mempersenjatai pasukan ataupun membangun benteng perlindungan dari serangan musuh.⁸⁴

Di antara berbagai peradaban yang ada di dunia ini dapat dipastikan bahwa peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada peradaban yang datang kemudian. Dengan demikian, maka kebudayaan Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang kemudian. Selain sentuhan-sentuhan budaya pada waktu damai, terutama dengan melalui perguruan-perguruan Islam masa itu, seperti sentuhan budaya antara Islam dan Barat pada waktu perang, yaitu pada peran salib. Islam pada waktu perang memperkenalkan perilaku-perilaku dan keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap

⁸⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 181-182.

musuh, terhadap tawanan perang dan prinsip-prinsip serta tata cara dan etika perang dalam Islam.⁸⁵

D. Ketenagakerjaan dalam Pandangan Islam

Manusia diciptakan Allah SWT., sebagai Khalifah di muka bumi untuk mengatur dan memanfaatkan serta mengeksploitasi segala macam sumber daya alam yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini tentunya menuntut adanya peran dan tanggung jawab manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Dalam upaya mengoptimalkan fungsi, peran dan tugasnya Allah SWT memerintahkan agar manusia berusaha semaksimal mungkin untuk dapat merubah dan meningkatkan serta memperbaiki taraf hidupnya di dunia. Perintah tersebut dapat dipahami bahwa setiap manusia wajib menjadi tenaga kerja yang produktif, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga maupun kebutuhan manusia lainnya.⁸⁶

Secara alami manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga untuk menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk menyambung hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan manusia itu sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, karena itu dalam kehidupan seseorang dalam masyarakat (*society*) akan terjadi saling menukar hasil tenaganya dengan tenaga orang lain. Atas dasar inilah maka individu yang hidup dalam masyarakat akan mencurahkan tenaganya dalam rangka menghasilkan harta untuk bisa langsung dihabiskan dan ditukar, bukan sekedar

⁸⁵ *Ibid*, h. 184-185.

⁸⁶ Sumitro Djoyohadikusumo, *Ekonomi Umum* (Jakarta: PT Pembangunan, 1999), h. 31.

menghabiskan tenaganya secara langsung sebab kebutuhannya banyak dan dia membutuhkan harta yang tidak dia miliki serta membutuhkan pemenuhan dari tenaga orang lain secara langsung, misalnya pendidikan dan kesehatan⁸⁷

Seberapapun kuat dan perkasanya seseorang, tenaga yang dihasilkan tidak akan mungkin cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya bagaimanapun bentuk dan ragamnya, karena manusia adalah makhluk yang memiliki keterbatasan yang memang tidak mungkin memenuhi semua kebutuhannya dengan tenaga tertentu, melainkan harus bergantung pada tenaga orang lain.⁸⁸

Konsep keterpakasaan menuntut manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa untuk hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain berupa tenaga dan waktu, oleh karena itu dalam Islam timbul satu aturan transaksi kerjasama yang dikenal dengan *Ijarah* yaitu transaksi jual beli jasa dan manfaat yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap berbagai pihak termasuk kepada pekerja.⁸⁹

Dalam ajaran syari'at Islam secara umum manusia pada dasarnya adalah merupakan makhluk pekerja, sekaligus makhluk pembangun, sehingga itulah bekerja atau beramal saleh dalam ajaran Islam adalah merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Akan tetapi bidang pekerjaan tersebut hendaklah mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Berdasarkan hal ini, maka Islam memandang aspek ketenagakerjaan

⁸⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012), h.103.

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 316.

adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kehidupan bahagia di dunia dan lebih khusus di akhirat.⁹⁰

Islam mewajibkan setiap muslim khususnya yang memiliki tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Pada saat sekarang ini sangat banyak berbagai macam pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keahliannya masing-masing. Apapun bentuk pekerjaan dapat dilakukan seseorang asalkan tidak menyalahi syariat Islam. Salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan yaitu menjadi karyawan pada usaha air minum dan menerima upah dari pekerjaan tersebut.⁹¹

Nabi Muhammad SAW mengusahakan sebuah program untuk emansipasi dan kesejahteraan para budak. Meskipun yang dilakukan Nabi Muhammad adalah arahan-arahan sederhana, sebenarnya mengenai hak asasi manusia termasuk hak-hak buruh atau tenaga kerja yang disebutkan dalam Al-Quran, Hadist bahkan hak asasi manusia (HAM) yang ada dalam Al-Quran dan Hadist tersebut sudah dirumuskan dalam kaidah-kaidah fiqh. Adapun hak-hak tersebut antara lain:⁹²

1. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan, hak untuk mendapatkan perlindungan dan kehormatan nama baik.
2. Hak bebas memilih agama, hak untuk bebas berfikir dan berbicara, hak atas jaminan sosial.

⁹⁰ Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuatan Politik dalam Islam* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), h. 149.

⁹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 15.

⁹² Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 232

3. Para buruh harus mendapatkan upah yang semestinya dan hidup yang layak.
4. Buruh juga tidak dapat diberikan pekerjaan melampaui batas kemampuannya.
5. Buruh juga harus mendapatkan bantuan medis jika sakit dan dibantu biaya perawatan.
6. Pengusaha harus diberikan dorongan untuk menafkahkan sedekah mereka pada para pekerja dan anak-anak.
7. Pengusaha membayar ganti rugi kecelakaan yang cukup selama dalam bekerja.
8. Buruh wajib diperlakukan dengan baik.
9. Buruh harus mendapatkan hak persamaan dan kedudukan.

Dalam sebuah lingkungan pekerjaan hubungan kerja antara majikan dan buruh harus dijaga dengan baik. Karena jika diantara majikan dan buruh tidak terjalin dengan baik maka akan terjadi konflik dalam sebuah hubungan pekerjaan. Islam menghubungkan keduanya dalam jalinan persahabatan dan persaudaraan, dengan cara tersebut maka tidak akan terjadi benturan dalam kepentingan masing-masing. Di dalam sebuah lingkungan pekerjaan maka sangat dibutuhkan adanya rasa saling percaya, niat yang baik dan menghormati hak-hak orang lain.⁹³ Hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut:⁹⁴

1. Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.

⁹³ Rahman Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam" (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). h. 391-392.

⁹⁴ *Ibid*, h. 392

2. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya.
3. Mereka harus diperlakukan dengan baik dan sopan dan dimaafkan jika mereka melakukan kesalahan selama bekerja.
4. Pekerja harus diberi bantuan pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
5. Mereka harus dibayar dengan ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.

Majikan bertanggung jawab menjamin kepastian kerja bagi para pekerja.⁹⁵ Karena kekayaan yang merupakan hasil kerjasama antara pekerja dengan majikan itu diakui oleh Islam. Akan tetapi, posisi pekerja termasuk lemah karena kepentingannya seolah-olah terancam oleh kepentingan majikan. Maka Islam memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak pekerja dengan adanya jaminan pekerjaan.⁹⁶

Menurut M. Quraishy Shihab dalam bukunya tafsir Al-Misbah menafsirkan maksud dari ayat tersebut yaitu Allah telah membebaskan kaum lelaki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Masing-masing keduanya tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. Allah telah mengkhususkan bagi yang lainnya. Allah telah mengkhususkan pekerjaan-pekerjaan rumah bagi kaum wanita, dan pekerjaan-pekerjaan berat diluar rumah bagi kaum lelaki, agar masing-masing dapat menekuni pekerjaannya sendiri dan mengerjakan kewajiban dengan ikhlas hendaknya masing-masing memohon pertolongan dan kekuatan Rabb-nya dengan melaksanakan

⁹⁵ *Ibid*, h. 113.

⁹⁶ Rahman Afzalur, *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", h. 389

pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Dan jangan iri hati terhadap apa yang dibebankan kepada pihak lain. Termasuk kedalam larangan ini adalah iri hati terhadap segala perkara yang sifatnya *Khilkiyyah* (ciptaan), seperti akal keindahan, karena tidak ada gunanya iri hati terhadapnyabagi orang yang tidak diberi hal itu. Tidak termasuk kedalam larangan ini adalah perkara-perkara yang menyangkut mata pencarian, karena seseorang diuji untuk melihat apa yang telah diperoleh oleh orang lain, lalu berangan-angan seperti mereka atau lebih baik padanya dengan berusaha dan bersungguh-sungguh.⁹⁷

Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.⁹⁸

Upah adalah hak/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.⁹⁹ Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: Upah adalah suatu penerimaan sebagai kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak

⁹⁷ M.Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 416.

⁹⁸ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 94

⁹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 1250.

bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima pekerja.¹⁰⁰

Seorang majikan Muslim tidak dapat dikatakan orang yang beriman, jika niatnya semata-mata mencari keuntungan dalam industrialisasi. Sebaliknya seorang majikan Muslim dapat dikatakan orang yang beriman jika dia lebih mengutamakan kebaikan masyarakat termasuk orang-orang yang bekerja dengannya. Karena semangat berbuat baik dan cinta kepada sesama yang diajarkan Islam telah tumbuh dalam jiwa orang-orang yang beriman. Perhatian majikan terhadap pekerjanya tidak hanya pada upahnya saja. Akan tetapi majikan juga harus memperhatikan kesehatan serta kesejahteraan para pekerjanya dan berusaha agar pekerjanya dapat merasa puas di lingkungan perusahaannya.¹⁰¹

Kewajiban para pekerja juga harus jelas supaya mereka dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi kewajiban pekerja yaitu:¹⁰²

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat dan teliti.

¹⁰⁰ Veithal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 799.

¹⁰¹ Salim, J.T. *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Intermasa, 2002), h.110

¹⁰² Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonoomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 154.

4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan jika bentuk pekerjaan berupa urusan hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

Perlindungan terhadap buruh sebagaimana yang telah diatur dalam Islam sangatlah jelas dan mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk buruh atau tenaga kerja. Perlindungan yang diberikan Islam kepada buruh atau tenaga kerja yaitu berupa larangan adanya penindasan atau kezhaliman yang berupa diskriminasi serta menganjurkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak buruh atau tenaga kerja seperti yang terdapat di dalam Al Quran dan Hadist yang kemudian dirumuskan dalam kaidah-kaidah fiqih.¹⁰³

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (*preliminary reasearch*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi.

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Muslimah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul

¹⁰³ *Ibid*, h. 233.

skripsi “*Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-Phi/2013*”. Latar belakang dari skripsi tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013 yang merupakan putusan dalam perkara perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak antara Stephen Michael Young, Warga Negara Australia dan PT. Siemens Indonesia. Pada perkara tersebut, Stephen telah bekerja di PT. Siemens Indonesia secara kontinu selama 13 (tiga belas) tahun. Dan juga *Employment Agreement* tersebut juga mensyaratkan adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Lalu PT. Siemens juga mempekerjakan Stephen dari tahun 1999 s/d 2001 tanpa adanya perjanjian kerja sehingga perselisihan timbul ketika PT. Siemens Indonesia melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada Stephen Michael Young.

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya yakni adanya Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-PHI/2013, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pembatasan hukum Tenaga Kerja Asing terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Siemens Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pembatasan hubungan kerja TKA

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tinjauan Umum Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Hubungan Kerja Waktu Tertentu Pembatasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui perizinan, dimana pemberi kerja yang ingin memperkerjakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, penggunaan TKA hanya sebatas pada jabatan tertentu, yaitu melalui penentuan syarat standar kompetensi yang hanya jabatan yang memiliki syarat keahlian dan keterampilan yang diizinkan diduduki oleh TKA, dan penggunaan TKA hanya pada hubungan kerja waktu tertentu.¹⁰⁴

2. Saputri Ratu Penghuni dari Universitas Bandar Lampung, Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Tatanegara, dengan judul skripsi *“Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung”*. Latar belakang dari skripsi tersebut yaitu Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Provinsi Lampung banyak yang tinggal di Kota Bandar Lampung dan yang menggunakan tenaga kerja asing tersebut tentunya sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat bekerja di perusahaan yang mengajukan izin penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia khususnya di kota Bandar Lampung. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing

¹⁰⁴ Muslimah, “Implementasi Pembatasan Hubungan Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-Phi/2013”. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), h. 83.

(IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh direktur atau gubernur atau bupati/walikota, melalui dinas tenaga kerja, maka dalam hal ini dinas tenaga kerja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas dalam hal perpanjangan dan tentunya tentang pengawasan tenaga kerja asing yang bekerja selama ini di Kota Bandar Lampung.

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dan apakah faktor penghambat dan pendukung dalam Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung.

Proses pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja kota bandar lampung terhadap perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yaitu melalui pemberian izin memperkerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor pengngambat dalam pemberian Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung antara lain:

- a. Pihak pengguna TKA lalai,dengan sengaja tidak mengurus perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- b. Kurangnya kordinasi antara kantor imigrasi yang menerbitkan izin tinggal dengan Disnakertrans Provinsi Lampung atau Depnakertrans

sebagai instansi yang mengeluarkan izin memperkerjakan tenaga kerja asing.

- c. Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung terhadap TKA yang ada di kota bandar lampung.
- d. Belum optimalnya program sosialisasi yang disebabkan tidak tersedianya anggaran dari depnakertrans.¹⁰⁵

3. Abharina Atikah Sari dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan judul skripsi "*Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon*". Latar belakang dari skripsi tersebut yaitu Kedatangan Tenaga Kerja Asing mempunyai kemungkinan dampak negatif apabila terjadi pelanggaran terhadap dokumen ketenagakerjaan, izin tinggal, visa, atau ketentuan perundangan lainnya. Sehingga diperlukan pengawasan yang efektif dari Pemerintah Daerah. Karena jika tidak dilakukannya pengawasan yang efektif maka dikhawatirkan akan terus terjadi penyimpangan atau pelanggaran oleh Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "*Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon*".

Rumusan masalah akan memberikan suatu arahan yang jelas untuk mengadakan penelaahan, serta hasil analisis itu sendiri akan lebih nyata, sehingga peneliti harus membatasi masalah yang akan dianalisis karena dapat membantu memperjelas pengkajiannya. Sehubungan dengan itu

¹⁰⁵ Saputri Ratu Penghuni. "Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung". (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung, Lampung, 2015), h. 81.

penulis merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon.

Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan dan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon dilakukan berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait dan membuat tim pengawasan orang asing atau Timpora. Pengawasan dilakukan dengan akurat dan tepat waktu serta menyeluruh dengan mengawasi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki Tenaga Kerja Asing. Adapun biaya untuk melakukan kegiatan pengawasan yang diperoleh dari APBD dan adanya pendapatan yang diperoleh dari retribusi izin tenaga kerja asing. Namun dalam pengawasannya masih dikatakan belum maksimal, hal ini dikarenakan berbagai faktor diantaranya yaitu, kurangnya sumber daya manusia yang memadai, jumlah petugas pengawas dalam Timpora belum memadai karena di setiap instansi hanya diambil 2 orang untuk pengawasannya, sedangkan jumlah Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon yang harus diawasi tercatat pada tahun 2016 sebanyak 1240 TKA. Sehingga terdapat ketimpangan antara jumlah pengawas dengan jumlah Tenaga Kerja Asing yang ada di Kota Cilegon.¹⁰⁶

Maka dengan demikian dari beberapa skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang sedang saya bahas. Skripsi yang saya teliti membahas tentang prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden

¹⁰⁶ Abharina Atikah Sari. "Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kota Cilegon". Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2018), h. 84.

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta melihat bagaimana perspektif Islam memandang hal tersebut. Dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam pasal 10 yang berbunyi setiap pemberi Kerja TKA yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: alasan penggunaan TKA, jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, dan penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.
2. Prosedur penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab di dalam *siyasah dauliyah*, istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan *ahl al-dzimmi* yang memasuki wilayah *dar al-harb* dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke *dar al-Islam* sebelum izinnya habis. Dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 juga demikian, TKA yang masuk ke Indonesia harus mendapat izin terlebih dahulu, apabila izinnya habis bisa diperpanjang atau kembali ke negara asalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan; Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung: citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuatan Politik dalam Islam*, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Ahmad Hidayat, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol VI, No 2, *Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomati pada Masa damai)*, September 2016, h. 277.
- Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ahmad Yani Anshori, *Islam dan Negara Bangsa di Indonesia dalam Antologi Islam*, Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Dudley Dillard, *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, terj. M. Dawam Rahardjo, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Fordebi Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

H.S.Syarif, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Hasby Ash-Shiddqy, *Falasafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.

Ija Suntana, *Pengantar Mata Kuliah Siyasah Dauliyah*, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2003.

Kafir Harbi, Musta'min, dan Ahlul Dzimmah, <https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1990.

Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonoomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

M. Alifudin Ikhsan, *Fiqh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di Indonesia*, JIPPK, Vol. II, No 1. Juni , h. 36.

M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006.

Miriam Budihardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Muhammad Iqbal. *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Muhammad Tholhah Hasan, *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Muhammad Thalhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Mohammad Rusfi, AL-'ADALAH, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67. <http://portalgaruda.org/article.php?article=284102&val=5893&title=Validitas%20Maslahah%20Mursalah%20Sebagai%20Sumber%20Hukum>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

Narsif, *Hukum Diplomatik Konsuler*, Padang, Universitas Andalas, 2007.

Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh siyasah Sunni dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Perpres No 20 Tahun 2018. Tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Rahman Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*, Terj. Soeroyo Nastangin, "Doktrin Ekonomi Islam", Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Salim, J.T. *Bisnis Menurut Islam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Intermasa, 2002.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Soerjono Soekanto, *Peneliti Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Sugiyono, *Memahami Pengertian Kualitati*, Bandung: Alfabet, 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Sesuatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Sumitro Djoyohadikusumo, *Ekonomi Umum*, Jakarta: PT Pembangunan, 1999.

Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri RadenIntan, 2013.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002.

Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Veithal Rivai, *Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktik Manajemen Sumber Daya Islami*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.